

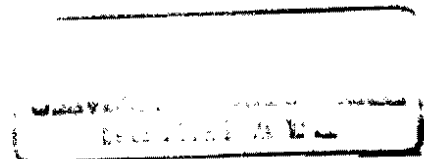
*INCOME TAX - ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT*

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PENGARUHNYA
PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL
PT. BUKIT JAYA ABADI DI SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

*A.291/07
Ram
P*



**DIAJUKAN OLEH :
AGNYESIA RAMDITA
No. Pokok : 040123704 E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PENGARUHNYA
PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL
PT. BUKIT JAYA ABADI DI SURABAYA**

**DIAJUKAN OLEH
AGNYESIA RAMDITA
No. Pokok : 040123704 E**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, Msi, AK.
NIP. 132 054 304

TANGGAL 4-10-2007

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



Drs. M.SUYUNUS, MAFIS, AK
NIP. 131 287 542

TANGGAL 5-10-2007

ABSTRAK

Pajak penghasilan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia dari pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan perpajakan. Salah satu diantaranya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Yang berisi tentang perubahan pengenaan tarif atas pendapatan kontrak yang diterima dan/atau diperoleh perusahaan konstruksi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diatas, maka perusahaan konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar yang menerima kontrak dengan Nilai Pengadaan Proyeknya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan tarif PPh pasal 17 UU No. 17 tahun 2000 akan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi dan laporan keuangan fiskalnya. Hal ini dikarenakan sebelum berlakunya PP Nomor 140 tahun 2000, PP Nomor 73 tahun 1998 yang berisi bahwa atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh perusahaan konstruksi dikenakan PPh pasal 23 yang bersifat *final*, sedangkan setelah berlakunya PP Nomor 140 tahun 2000 seperti tersebut diatas, maka akan mempengaruhi perlakuan akuntansi dan laporan keuangan fiskalnya baik mengenai pencatatannya, pengukuran dan pengakuan atas pendapatan dan biaya kontrak maupun penyajian pada laporan keuangannya.

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan konstruksi yang bertempat kedudukan di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *kualitatif* dengan metode studi kasus. Data yang diperlukan, diperoleh baik dari sumber intern perusahaan maupun penelitian kepustakaan, dengan terlebih dahulu melakukan *observasi* dan *survey* pendahuluan, kemudian melaksanakan wawancara dan documenter. Analisa dilakukan dengan membandingkan antara sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 140 tahun 2000 pada PT. Bukit Jaya Abadi untuk mengetahui seberapa besar perbedaannya dan pengaruhnya pada laporan keuangan fiskalnya. Dan akhirnya dengan evaluasi perlakuan akuntansi atas PPh pada jasa konstruksi dapat diketahui penghematan pajak atau *Tax Saving* atas penerapan PP Nomor 140 tahun 2000 diatas.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa apabila PT. Bukit Jaya Abadi mengakui pendapatan kontrak sebesar nilai wajarnya (dengan mengeluarkan unsur PPN), maka perusahaan akan mendapatkan *Tax Saving* atas PPh yang seharusnya terutang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 maka perusahaan akan dapat menghemat pajak yang merupakan selisih dari Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000. Dengan adanya *Tax Saving* diatas akan